



BULETIN

GREEN LIVING SUPPORT

Edisi Januari
2026

Rapat Kerja dan Serah Terima Jabatan Direktur Baru Green Living Support: Meneguhkan Arah Gerak dan Strategi Keberlanjutan

Green Living Support (GLS) menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja yang dirangkaikan dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Direktur sebagai bagian dari proses penguatan kelembagaan dan konsolidasi organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Januari 2026, yang menjadi momentum penting bagi GLS untuk melakukan refleksi, penataan kepengurusan, serta penyusunan rencana strategis ke depan dalam menjawab tantangan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Agenda sertijab secara resmi menandai pergantian kepemimpinan direktur GLS kepada Sendri, sebagai Direktur baru. Prosesi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi wujud komitmen organisasi dalam menjaga tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, pimpinan sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, staf, relawan, dan mitra yang telah berkontribusi dalam perjalanan GLS, sekaligus berharap kepemimpinan baru dapat membawa energi dan perspektif segar bagi pengembangan organisasi.

Sendri, selaku Direktur baru Green Living Support, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan nilai-nilai dasar GLS sebagai organisasi yang berfokus pada edukasi, advokasi, dan aksi nyata lingkungan. Ia menegaskan pentingnya kerja kolaboratif, penguatan kapasitas internal, serta perluasan dampak program agar GLS semakin relevan dan responsif terhadap isu lingkungan di tingkat lokal maupun nasional.



Rapat kerja yang dilaksanakan setelah sertijab menjadi ruang strategis bagi seluruh jajaran pengurus untuk membahas struktur kepengurusan GLS ke depan. Dalam forum ini, dilakukan penegasan peran dan tanggung jawab masing-masing divisi guna memastikan efektivitas kerja organisasi. Penguatan koordinasi antarbidang menjadi salah satu poin utama yang disepakati, mengingat kompleksitas program dan meningkatnya kebutuhan kerja lintas sektor.

Selain pembahasan kepengurusan, rapat kerja juga difokuskan pada perumusan rencana strategis GLS ke depan. Beberapa arah strategis yang dibahas meliputi penguatan program berbasis komunitas, pengembangan inisiatif ekonomi sirkular dan gaya hidup berkelanjutan, peningkatan kualitas riset dan edukasi publik, serta optimalisasi media dan kemitraan untuk memperluas jangkauan dampak. GLS juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang lebih rapi, termasuk dalam aspek administrasi, keuangan, dan pelaporan program.

Merawat Lingkungan Lewat Data: Wisnu Purnomo

Ketertarikan saya pada isu lingkungan tidak datang begitu saja. Ia tumbuh pelan-pelan, seiring saya belajar membaca data dan melihat bagaimana perubahan lingkungan benar-benar berdampak pada kehidupan sehari-hari. Dari angka, peta, dan laporan, saya mulai memahami bahwa banyak masalah lingkungan sebenarnya sudah terlihat jelas, hanya saja sering tidak dibicarakan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Saya terlibat di Green Living Support (GLS) sebagai bagian dari lingkaran studi, dan dari sana saya semakin dekat dengan isu lingkungan. Bagi saya, lingkungan bukan hanya soal alam, tetapi juga tentang manusia. Ketika hutan berkurang, kualitas air menurun, atau udara memburuk, yang terdampak pertama kali adalah masyarakat. Kesadaran ini membuat saya memilih menulis dan melakukan riset sebagai cara berkontribusi.



Sebagian besar tulisan saya mencoba menjelaskan isu lingkungan melalui data. Saya menulis tentang emisi batu bara dan kaitannya dengan ekonomi di negara-negara ASEAN, tentang laju deforestasi di Indonesia, serta tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Jawa Timur. Lewat tulisan-tulisan ini, saya ingin menunjukkan bahwa masalah lingkungan bisa dibaca secara sederhana, tanpa harus menghilangkan kedalaman analisisnya.



Isu bencana dan perubahan iklim juga menjadi bagian penting dari perjalanan saya. Bersama GLS, saya ikut terlibat dalam riset tentang banjir di Sumatra dan ketahanan ekonomi rumah tangga yang terdampak bencana. Dari proses itu, saya belajar bahwa banjir bukan hanya soal hujan deras, tetapi juga soal kerusakan lingkungan, tata ruang, dan kesiapan masyarakat. Menulis tentang bencana bagi saya adalah upaya untuk mengajak pembaca melihat masalahnya secara utuh.

Saya juga aktif berbagi di LinkedIn, baik tentang riset, tulisan, maupun pengalaman akademik. Saya percaya bahwa isu lingkungan tidak cukup hanya dibahas di ruang kelas atau jurnal ilmiah. Ia perlu dibagikan ke ruang yang lebih luas agar semakin banyak orang yang peduli dan terlibat.

Merawat Lingkungan Lewat Data: Wisnu Purnomo

Selain menulis artikel populer, saya juga aktif menulis artikel jurnal. Salah satu tulisan saya sudah terbit di East Java Economic Journal. Meskipun menggunakan pendekatan ekonomi, riset ini tetap berangkat dari perhatian yang sama, yaitu bagaimana kebijakan dan struktur ekonomi dapat berdampak pada keberlanjutan dan kesejahteraan, termasuk dalam konteks lingkungan.



ejavec JOURNAL

P-ISSN: 2597-8780
E-ISSN: 2830-2001
OPEN ACCESS

EAST JAVA ECONOMIC JOURNAL

Published by Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. In collaboration with Faculty of Economics and Business Universitas Airlangga

HOME ABOUT PEOPLE ISSUES ANNOUNCEMENTS REGISTER LOGIN SEARCH

HOME / ARCHIVES / VOL. 9 NO. 2 (2025) / Articles

The Impact of Industrial Agglomeration on Labor Misallocation in East Java

Wisnu Purnomo
Department Economics, Faculty Economics and Business, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Martha Rangi Primanthi
Department Economics, Faculty Economics and Business, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.53572/ejavec.v9i2.156>

Keywords: Industrial Agglomeration, Labor Misallocation, East Java, Gerbangkertosusila

PDF

PUBLISHED

2025-09-30

HOW TO CITE

Purnomo, W., & Primanthi, M. R. (2025). The Impact of Industrial Agglomeration on Labor Misallocation in East Java. *East Java Economic Journal*

ADDITIONAL MENU

- Author Guideliness
- Article Processing Charge
- Focus and Scope
- Section Policies
- Peer Review Process
- Publication Frequency
- Open Access Policies
- Plagiarism Policies

Terpilih sebagai Green Heroes di GLS menjadi pengingat bagi saya bahwa kontribusi untuk lingkungan bisa datang dari banyak cara. Saya mungkin lebih sering berada di balik layar, membaca data dan menulis, tetapi saya percaya bahwa tulisan yang jujur dan riset yang berpihak pada lingkungan juga bisa menjadi bagian dari upaya merawat bumi.

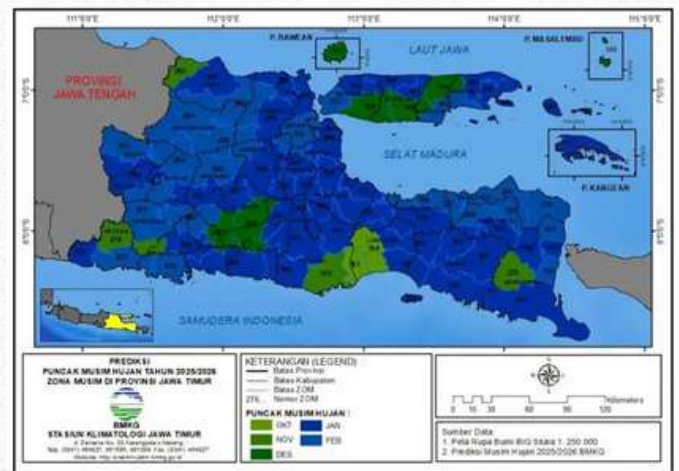
Sekolah di Tengah Cuaca Ekstrem: Ruang Aman Anak yang Perlu Diperkuat

Memasuki akhir Januari 2026, peringatan cuaca ekstrem kembali dikeluarkan untuk hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Hujan lebat, angin kencang, hingga potensi banjir dan longsor diprediksi masih akan terus terjadi dalam beberapa hari ke depan. Di tengah dinamika atmosfer yang kian tidak menentu, satu pertanyaan penting muncul: sejauh mana sekolah kita siap melindungi anak-anak di tengah cuaca ekstrem?

Bagi GLS, isu ini bukan sekadar soal cuaca, melainkan juga soal keselamatan, keberlanjutan pendidikan, dan perlindungan anak terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis dan sosial lebih rentan.

Cuaca Ekstrem dan Realitas Sekolah di Jawa Timur

Berdasarkan peringatan dari BMKG, kombinasi Monsun Asia, gelombang atmosfer *Madden Julian Oscillation*, gangguan *Equatorial Rossby*, hingga suhu muka laut yang hangat di sekitar Jawa Timur menciptakan kondisi atmosfer yang sangat labil. Dampaknya tidak hanya berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, tetapi juga angin kencang, petir, hingga hujan es di beberapa wilayah.



Kabupaten dan kota seperti Mojokerto, Malang, Jember, Lumajang, Pacitan, Trenggalek, Bondowoso, hingga wilayah Madura masuk dalam daftar daerah yang diminta meningkatkan kewaspadaan. Di wilayah-wilayah ini, banyak sekolah berdiri berdekatan dengan sungai, lereng perbukitan, atau akses jalan yang rawan licin dan tergenang.

Anak Sekolah sebagai Kelompok Rentan

Anak-anak adalah kelompok yang paling terdampak dalam situasi cuaca ekstrem. Jalan menuju sekolah yang licin, genangan air di halaman sekolah, pohon tumbang, hingga atap bangunan yang tidak kokoh menjadi risiko nyata yang mereka hadapi setiap hari. Di banyak sekolah dasar, terutama di wilayah semi-rural dan pedesaan Jawa Timur, kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi masih sangat terbatas. Prosedur evakuasi belum dipahami dengan baik, akses informasi cuaca masih bergantung pada kabar dari mulut ke mulut, dan integrasi isu cuaca ekstrem ke dalam kegiatan belajar belum menjadi kebiasaan. Padahal, perubahan iklim membuat cuaca ekstrem bukan lagi peristiwa langka, melainkan realitas baru yang harus dihadapi bersama.

Sekolah di Tengah Cuaca Ekstrem: Ruang Aman Anak yang Perlu Diperkuat

Menghadapi cuaca ekstrem tidak selalu harus dimulai dari teknologi canggih. Di tingkat sekolah, langkah-langkah sederhana bisa memberi dampak besar. Mulai dari memastikan saluran air sekolah tidak tersumbat, penataan pohon agar tidak membahayakan, hingga penyusunan jalur evakuasi yang mudah dipahami anak-anak. Sekolah juga bisa menjadi ruang edukasi adaptasi iklim melalui kegiatan praktik. Kebun sekolah, pengelolaan air hujan, pengomposan, hingga pemanfaatan ruang hijau dapat menjadi media belajar sekaligus strategi mitigasi risiko lingkungan. Pendekatan inilah yang selama ini didorong GLS: menghubungkan pendidikan, lingkungan, dan ketahanan sejak usia dini.

Menuju Sekolah yang Tangguh Iklim

Cuaca ekstrem di Jawa Timur hari ini adalah pengingat bahwa sistem pendidikan perlu beradaptasi dengan cepat. Ketahanan tidak hanya diukur dari bangunan fisik, tetapi juga dari kesiapan pengetahuan, sikap, dan kebiasaan.

Sekolah yang tangguh iklim adalah sekolah yang:

- Peka terhadap perubahan cuaca.
- Adaptif terhadap risiko lingkungan.
- Menempatkan keselamatan serta kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Di tengah hujan lebat dan angin kencang, sekolah justru memiliki peluang besar untuk menjadi ruang pembelajaran paling relevan bagi anak-anak: belajar tentang alam, risiko, dan cara hidup berdampingan dengan perubahan. Bagi GLS, menjaga anak sekolah di tengah cuaca ekstrem bukan hanya soal respons darurat, tetapi investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang lebih sadar lingkungan, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi masa depan yang semakin tidak pasti.

Deforestation Rates Indonesia: Membaca Data, Memahami Risiko, dan Menyusun Arah Kebijakan yang Lebih Tangguh

Dalam dua dekade terakhir, hutan Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Data tutupan pohon menunjukkan bahwa sejak awal 2000-an hingga 2024, Indonesia telah kehilangan sekitar 32 juta hektare tutupan pohon, atau setara dengan 20 persen dari luas tutupan pohon pada tahun 2000. Angka ini bukan hanya sekadar statistik kehutanan, namun dibaliknya tersimpan cerita tentang meningkatnya risiko bencana, tekanan terhadap ketahanan pangan, serta tantangan besar dalam mencapai target iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Kehilangan tutupan pohon ini juga berkontribusi signifikan terhadap emisi. Diperkirakan sekitar 23 gigaton CO₂e dilepaskan ke atmosfer dalam periode tersebut. Artinya, deforestasi bukan hanya persoalan lokal atau sektoral, tetapi merupakan bagian dari persoalan global yang dampaknya dirasakan dalam bentuk seperti bencana, cuaca ekstrem, hingga terganggunya sistem produksi pangan.

Salah satu temuan paling mengkhawatirkan adalah hilangnya hutan primer lembap. Dalam periode 2002-2024, Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer, yang mencakup 34 persen dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Secara keseluruhan, luas hutan primer Indonesia menyusut sekitar 11 persen. Hutan primer bukan hanya sekadar kawasan hutan semata, namun hutan primer menyimpan cadangan karbon besar, menjaga siklus air, serta menjadi penyangga kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam. Ketika hutan primer hilang, dampaknya tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh hutan tanaman atau penanaman kembali dalam waktu singkat.

Deforestasi Didominasi Perubahan Lahan Permanen

Data menunjukkan bahwa sekitar 76 persen kehilangan tutupan pohon di Indonesia terjadi di wilayah yang mengalami deforestasi permanen. Pendorong utamanya adalah ekspansi pertanian permanen, yang luasnya mencapai sekitar 23 juta hektare. Diikuti oleh aktivitas lain seperti komoditas keras, pembangunan infrastruktur, dan perluasan permukiman. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat sementara seperti penebangan, kebakaran hutan, atau ladang berpindah memang tetap signifikan, tetapi bukan faktor dominan. Ini memberi pesan penting bagi kebijakan bahwa persoalan deforestasi Indonesia tidak bisa diselesaikan hanya dengan respons darurat kebakaran atau rehabilitasi pasca kerusakan.

Deforestation Rates Indonesia: Membaca Data, Memahami Risiko, dan Menyusun Arah Kebijakan yang Lebih Tangguh

Kehilangan tutupan pohon di Indonesia juga sangat terkonsentrasi secara geografis. Lima provinsi yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur menyumbang sekitar 59 persen dari total kehilangan tutupan pohon nasional sejak 2001. Di wilayah-wilayah ini, tekanan terhadap hutan berjalan seiring dengan meningkatnya risiko banjir, kebakaran, dan konflik lahan.

Di sisi lain, wilayah seperti Papua masih menyimpan tutupan hutan yang sangat besar, sekitar 30 juta hektare. Kondisi ini menempatkan Papua pada posisi yang strategis sekaligus rentan. Tanpa pendekatan kebijakan yang berhati-hati dan berpihak pada masyarakat, wilayah dengan tutupan hutan tinggi berpotensi mengulangi pola deforestasi yang telah terjadi di wilayah lain.



Indonesia memang mencatat adanya penambahan tutupan pohon. Dari tahun 2000 hingga 2020, terdapat sekitar 4,9 juta hektare pertambahan tutupan. Namun pada periode yang sama, kehilangan mencapai 9 juta hektare, sehingga secara netto Indonesia tetap mengalami penurunan sekitar 4,1 juta hektare. Data ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan dan penanaman kembali hutan belum mampu mengimbangi laju kehilangan. Terlebih lagi, tidak semua tutupan baru memiliki fungsi ekologis yang sama dengan hutan alam. Pergantian hutan alam menjadi tutupan non-alam tetap membawa konsekuensi jangka panjang terhadap tata air, keanekaragaman hayati, dan ketahanan sosial-ekonomi.

Mengapa Deforestasi Relevan dengan Ketahanan Pangan dan Bencana?

Bagi GLS, membaca data deforestasi adalah masalah multiaspek. Kehilangan hutan berarti berkaitan erat dengan meningkatnya bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang dalam beberapa waktu terakhir semakin sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Ketika hutan di hulu rusak, daya serap tanah menurun, aliran air menjadi tidak terkendali, dan wilayah hilir yang akan menanggung dampaknya.

Deforestation Rates Indonesia: Membaca Data, Memahami Risiko, dan Menyusun Arah Kebijakan yang Lebih Tangguh

Dalam situasi bencana, yang paling cepat terguncang adalah akses pangan masyarakat. Jalur distribusi terputus, produksi terganggu, dan harga pangan melonjak. Riset-riset GLS sebelumnya menunjukkan bahwa rumah tangga di wilayah rawan bencana cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang lebih rendah, terutama ketika infrastruktur, pasar, dan sistem logistik tidak siap menghadapi guncangan. Dengan kata lain, deforestasi adalah akar dari rangkaian persoalan yang saling terhubung.

Arah Kebijakan yang Perlu Diperkuat

Melihat pola dan data tersebut, GLS memandang bahwa kebijakan kehutanan dan penggunaan lahan perlu bergerak melampaui pendekatan sektoral. Perlindungan hutan primer dan hutan alam harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional, bukan sekadar isu lingkungan. Pengendalian perubahan penggunaan lahan, rehabilitasi kawasan hulu DAS, penguatan pangan lokal, serta peningkatan kapasitas desa dalam mitigasi bencana perlu berjalan beriringan. Kebijakan yang hanya berfokus pada pemulihan pasca-bencana akan selalu tertinggal satu langkah dibandingkan kerusakan yang terjadi.

Data deforestasi Indonesia memberi pesan yang jelas, bahwa tantangan kita bukan hanya berapa banyak hutan yang hilang, tetapi bagaimana kehilangan itu membentuk risiko di masa yang akan datang. Melalui riset dan analisis kebijakan, GLS berupaya menjembatani data dengan realitas di lapangan, sehingga membantu pembuat kebijakan melihat keterkaitan antara hutan, pangan, bencana, dan kesejahteraan masyarakat.

Jika hutan terus berkurang, maka biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung akan semakin besar. Sebaliknya, jika perlindungan hutan ditempatkan sebagai investasi jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun masa depan yang lebih tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Sumber data:

https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?category=forest_change&lang=id&map=eyJjYW5Cb3VuZCI6dHJIZX0%3D

Kelapa Sawit di Jawa Timur: Antara Komoditas Strategis, Keterbatasan Lahan, dan Tantangan Hilirisasi

Pernyataan Gubernur Jawa Barat yang melarang pengembangan kelapa sawit di wilayahnya kembali membuka diskusi panjang tentang masa depan sawit di Pulau Jawa. Namun, membawa wacana larangan secara seragam ke seluruh provinsi di Jawa berisiko mengabaikan konteks lokal yang berbeda antar wilayah. Jawa Timur, misalnya, memiliki pengalaman dan realitas sawit yang kompleks, tidak masif, tidak terpusat, namun tetap strategis.

Diskusi ini semakin relevan ketika minyak sawit atau CPO justru menjadi salah satu topik utama dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, dan dihadiri sejumlah kementerian serta lembaga strategis, termasuk Kementerian Perdagangan dan Perum BULOG. Dalam forum tersebut, ditegaskan bahwa minyak sawit menempati peringkat pertama ekspor pangan dari Jawa Timur, dengan pangsa pasar ekspor nasional mencapai 11,2 persen. Artinya, meskipun luasan sawit di Jawa Timur relatif kecil dan tidak tercatat sebagai sentra nasional, posisinya dalam rantai nilai pangan dan ekspor justru cukup signifikan.

Sawit Jawa Timur: Tumbuh dari Inisiatif Lokal, Bukan Ekspansi Besar

Keberadaan kelapa sawit di Jawa Timur terutama terkonsentrasi di wilayah selatan, seperti Jember, Lumajang, Malang Selatan, Blitar Selatan, Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan. Sawit di wilayah ini tidak lahir dari program besar negara, melainkan dari inisiatif lokal. Salah satu titik awalnya adalah ketika pendiri PT Sawit Arum Madani (SAM) melihat keberhasilan sawit di Malaysia dan mencoba menerapkannya di Blitar Selatan, yang mana wilayah ini saat itu dikategorikan sebagai wilayah miskin.



Bibit sawit kemudian dibagikan kepada petani, meski pada fase awal tidak seluruhnya jelas asal-usul dan kualitasnya. Dari sinilah sawit menyebar secara organik, mengikuti keputusan petani perorangan. Hingga 2019, total kebun sawit rakyat di Jawa Timur diperkirakan sekitar 2.000 hektare, tersebar dalam petak-petak kecil yang jauh dari karakter hamparan luas sawit di Sumatera dan Kalimantan.

Kelapa Sawit di Jawa Timur: Antara Komoditas Strategis, Keterbatasan Lahan, dan Tantangan Hilirisasi

Setelah sawit mulai berbuah, PT SAM membangun pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 15 ton TPS per jam. Namun pasokan bahan baku yang terbatas membuat pabrik hanya beroperasi sekitar tiga hari dalam seminggu. Produksi CPO yang dihasilkan pun hanya sekitar 270 ton per tahun, dan sebagian besar dimanfaatkan sebagai campuran pakan ayam yang mana ini adalah sebuah adaptasi logis mengingat Blitar adalah sentra peternakan unggas.

Kondisi ini menunjukkan persoalan struktural, yaitu sawit di Jawa Timur hadir tanpa ekosistem pendukung yang matang. Tidak ada integrasi kebijakan antara hulu dan hilir, minim pembinaan petani, dan nyaris tanpa dukungan kelembagaan daerah. Bahkan hingga kini, perhatian pemerintah daerah dan keterlibatan civitas akademika masih sangat terbatas, sebagaimana disampaikan langsung oleh pengelola pabrik saat dikunjungi GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).

Di tingkat petani, persoalannya tidak kalah rumit. Sawit di Jawa Timur ditanam di lahan sempit, sering kali hanya 10 hingga 100 batang per petani, yang tersebar di berbagai lokasi. Di Pacitan, sebagian petani mulai menanam hingga 300 batang di lahan 2 hektare, menjadikan sawit sebagai alternatif setelah cengkeh terdampak penyakit. Namun tanpa pembinaan teknis, produktivitas sulit ditingkatkan. Petani juga tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi, karena sawit tidak masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Akibatnya, biaya produksi tinggi dan daya saing rendah.

Data Resmi Menunjukkan Paradoks

Hal yang menarik adalah data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur tahun 2021-2022 bahkan tidak mencatat luasan kelapa sawit secara resmi, sementara kelapa rakyat justru mendominasi. Pada 2022, luas perkebunan kelapa di Jawa Timur mencapai 232.145 hektare, dengan konsentrasi terbesar di Sumenep, Banyuwangi, Pacitan, dan Blitar.

Ketiadaan data sawit dalam statistik resmi memperlihatkan paradoks kebijakan yaitu sawit ada di lapangan, berkontribusi pada ekspor dan industri, tetapi tidak sepenuhnya terdata dalam perencanaan wilayah. Inilah yang membuat sawit di Jawa Timur berjalan di ruang abu-abu, yaitu tidak dilarang, tetapi juga tidak diarahkan.

Kelapa Sawit di Jawa Timur: Antara Komoditas Strategis, Keterbatasan Lahan, dan Tantangan Hilirisasi

Dalam Rakor Pangan 2025, pemerintah pusat menegaskan bahwa Jawa Timur adalah salah satu penopang surplus pangan nasional. Selain sawit, komoditas seperti susu, jagung, dan bawang merah juga menunjukkan performa ekspor positif. Untuk mendukung optimalisasi ini, pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur seperti Sistem Resi Gudang (SRG).

Saat ini, Jawa Timur memiliki 6 gudang SRG aktif, 17 gudang flat, dan 1 silo yang masih *idle*. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperkuat penyimpanan dan distribusi komoditas, termasuk minyak sawit. Stabilitas harga pangan di Jawa Timur yang relatif lebih terkendali dibanding rata-rata nasional juga disebut sebagai faktor penting bagi keberlanjutan ekspor. Namun, kembali lagi, keberhasilan ekspor ini belum sepenuhnya dirasakan oleh petani sawit di tingkat tapak.

Membaca Sawit Jawa Timur dengan Kacamata Kebijakan

Bagi GLS, kasus kelapa sawit di Jawa Timur memperlihatkan bahwa pendekatan kebijakan tidak bisa hitam-putih. Melarang sawit secara total berisiko mematikan sumber penghidupan sebagian petani. Sebaliknya, membiarkan sawit tumbuh tanpa arah justru menciptakan ketimpangan baru, misalnya pabrik merugi, petani terjebak, dan lingkungan menjadi rusak. Sawit di Jawa Timur seharusnya dibaca sebagai komoditas terbatas yang strategis, bukan komoditas ekspansif. Fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan petani kecil, kepastian benih dan pupuk, integrasi dengan sistem pangan lokal, dan hilirisasi bernilai tambah yang melibatkan UMKM.

Diskursus sawit di Jawa Timur menunjukkan bahwa satu pernyataan kebijakan tidak bisa berlaku untuk semua wilayah. Jawa Timur bukan Sumatera, bukan pula Kalimantan. Sawit di provinsi ini tumbuh di ruang sempit, namun menyimpan potensi. Jika dikelola dengan pendekatan kontekstual berbasis data, wilayah, dan kebutuhan masyarakat, sawit di Jawa Timur dapat berkontribusi pada kesejahteraan petani, penguatan UMKM, dan stabilitas pangan, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Di sinilah peran kebijakan menjadi krusial, yaitu bukan untuk memilih antara melarang atau membiarkan, tetapi mengarahkan.

Implementasi Circular Food Garden: Perawatan Ayam Halaman sebagai Media Edukasi di Sekolah

Green Living Support mengundang para pendidik, pegiat lingkungan, dan masyarakat umum untuk mengikuti Webinar Aksi dengan topik **Implementasi Circular Food Garden: Perawatan Ayam Halaman sebagai Media Edukasi di Sekolah.**

Kegiatan ini merupakan bagian dari program *Circular Food Garden* yang didukung oleh pendanaan *Direct Aid Programme* (DAP) dari Konjen Australia di Surabaya, sebagai upaya menghadirkan pembelajaran kontekstual tentang pangan berkelanjutan di lingkungan sekolah. Melalui praktik perawatan ayam halaman, siswa diajak memahami siklus pangan secara langsung: mulai dari pemanfaatan sisa makanan, perawatan hewan ternak, hingga nilai tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam webinar ini, peserta akan mendapatkan:

- Pemahaman konsep *Circular Food Garden* di sekolah
- Praktik dasar perawatan ayam halaman yang aman dan edukatif
- Strategi menjadikan kebun dan kandang ayam sebagai media pembelajaran tematik
- Inspirasi implementasi kegiatan berbasis lingkungan di sekolah

Webinar ini tidak hanya menjadi ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga wadah aksi nyata untuk mendorong sekolah berperan aktif dalam menciptakan ekosistem belajar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Informasi Pendaftaran: 082341959989 (Admin)



• **FREE** WEBINAR AKSI VOL 5

PELAJARI PENTINGNYA

Implementasi Circular Food Garden: Perawatan Ayam Halaman sebagai Media Edukasi di Sekolah

Narasumber
Erlin Oktania
Krucil's Big Garden

Moderator
Harliana
Green Living Support

MINGGU | 15-02-2026 | 19.00 - 21.00 WIB

Mari bersama membangun sekolah berdaya melalui praktik sederhana yang berdampak besar bagi masa depan pangan dan lingkungan.

REGISTRASI SEGERA → <https://bit.ly/WebinarAksiVol5>

Community Partner:  CP: 082341959989 (Admin GLS)

FIND US HERE!



www.greenlivingsupport.or.id
admin@greenlivingsupport.org

